

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi jangka panjang disetiap periode. Dalam setiap periode daerah regional tertentu berupaya untuk meningkatkan perekonomian daerah demi terciptanya kesejahteraan dengan meningkatkan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian tersebut secara makro. Dengan demikian kebutuhan akan jumlah tenaga kerja, investasi sebagai pembentukan modal, serta perdagangan internasional yang di nyatakan dalam teori ekonomi makro sebagai input atau faktor-faktor penunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal di suatu daerah regional tertentu.

Pembangunan ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengusahakan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan negara yang sedang berkembang terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang. Indonesia merupakan masyarakat dengan adil dan merata. Pembangunan suatu bangsa memerlukan dua aset utama atau "daya" yang disebut sumber daya (resources), yakni sumber daya alam (natural resources), dan sumber daya manusia (human resources). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Hal ini dapat kita amati dari kemajuan-kemajuan suatu negara sebagai indikator keberhasilan pembangunan bangsa tersebut.

Pembangunan ekonomi adalah masalah yang penting dalam perekonomian suatu Negara yang sudah menjadi agenda setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil. Menurut Arsyad (2004), Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Berhasilnya suatu pembangunan oleh suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari perkembangan indikator-indikator perekonomian yang ada, apakah mengalami peningkatan atau penurunan. Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk dalam salah satu indikator pembangunan suatu negara. Secara tradisional, pembangunan memiliki arti peningkatan PDB secara terus menerus. Pembangunan suatu negara yang baik juga harus diikuti pembangunan ekonomi yang baik juga. Hal ini bisa dilihat dari periode ke periode lainnya bahwa kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi meningkat. Menurut para ekonom, dalam Arsyad (2004), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih

besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

**Tabel 1.1**  
**Produk Domestik Bruto Indonesia Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2008-2019 (Triliun Rupiah)**

Tahun	PDB Indonesia	Pertumbuhan (%)
2008	2.082,5	6,0
2009	2.178,8	4,6
2010	2.314,5	6,2
2011	2.463,2	6,5
2012	2.618,1	6,2
2013	2.770,3	5,7
2014	8.564,9	5,0
2015	8.982,5	4,9
2016	9.434,6	5,0
2017	13.589,8	5,2
2018	14.838,8	5,2
2019	15.833,9	5,0

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang disajikan pada tabel 1.1 menggambarkan perkembangan pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2008-2019 yang mengalami fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis yang semula 6,0% menjadi 4,6%. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh krisis keuangan global yang terjadi di negara adidaya Amerika Serikat yang berdampak kepada seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Penurunan pertumbuhan ekonomi kembali terjadi pada tahun 2014 menjadi 5,0% turun 0,7% yang semula 5,7% . Penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi ini ialah nilai ekspor yang menurun akibat melemahnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama, dan merosotnya harga komoditas ekspor berbasis sumber daya

alam (SDA). Selain itu nilai pertumbuhan ekonomi yang tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 6,5%.

Selain untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang optimal, pembangunan juga perlu dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan perekonomian di setiap daerah regional yang ada, seperti di Indonesia. Hal tersebut diperlukan karena Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan daerah regional dalam jumlah yang banyak, dimana setiap daerah regional memiliki karakteristik yang berbeda. Berbagai perbedaan antar daerah regional merupakan konsekuensi dari berbagai variasi: geofisik dasar, kondisi perekonomian, distribusi sumber daya alam serta atribut sosial masyarakat (Karmaji, 2007).

Pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat atau secara nasional, tetapi juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2004). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengelola potensi dan sumber daya yang ada bagi masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah juga berperan penting terhadap sukses atau tidaknya pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Sebagai bagian dari

pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk enam provinsi di Pulau Jawa harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi sehingga diharapkan akan memiliki tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Nilai PDRB Atas Harga Konstan Provinsi di Pulau Jawa 2010-2019 (%)**

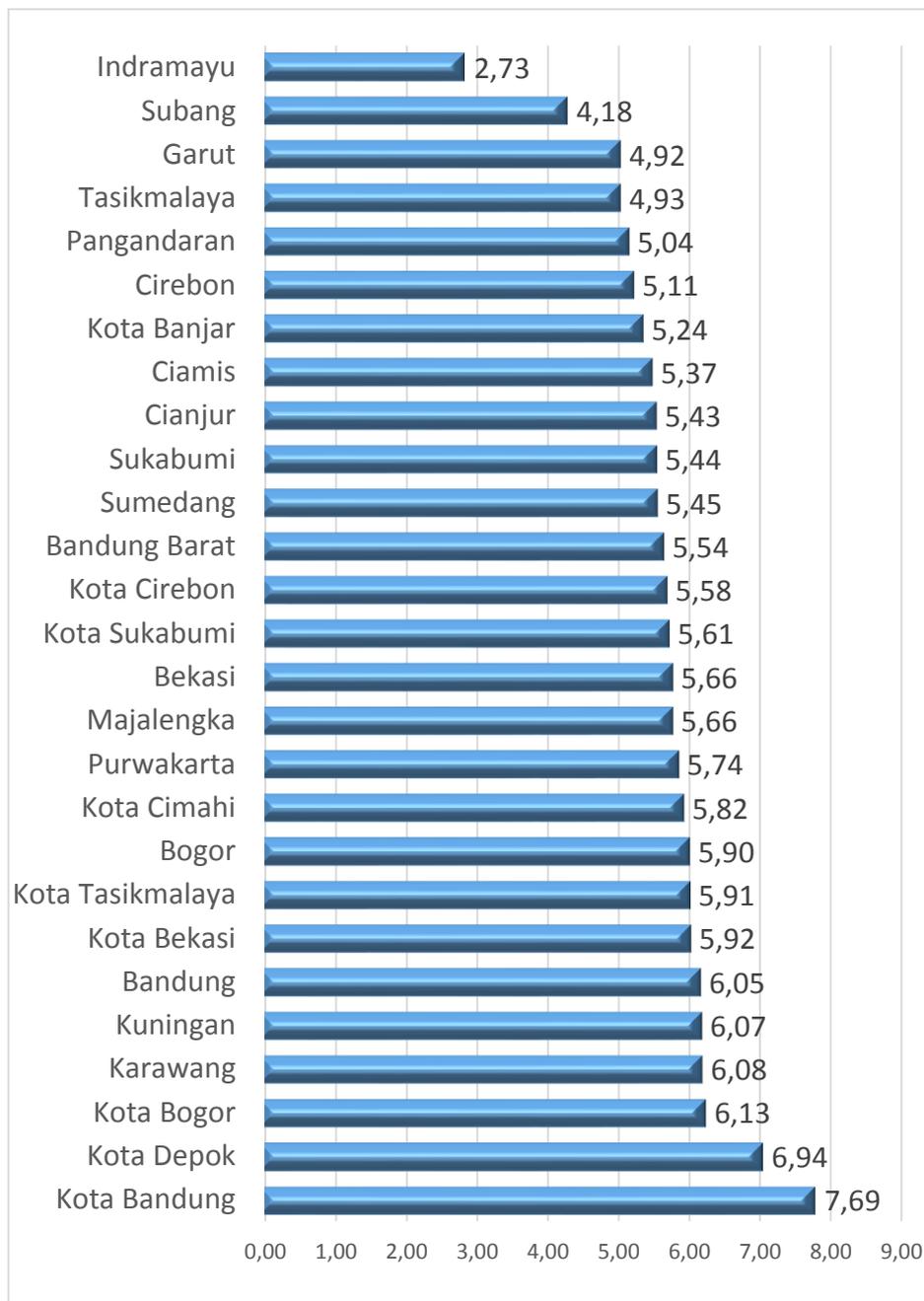
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata
DKI Jakarta	6,35	6,73	6,53	6,07	5,91	5,91	5,87	6,20	6,17	5,89	6,16
<b>Jawa Barat</b>	<b>6,20</b>	<b>6,50</b>	<b>6,50</b>	<b>6,33</b>	<b>5,09</b>	<b>5,04</b>	<b>5,67</b>	<b>5,33</b>	<b>5,66</b>	<b>5,07</b>	<b>5,74</b>
Jawa Tengah	5,84	5,30	5,34	5,11	5,27	5,47	5,25	5,26	5,31	5,41	5,36
DI Yogyakarta	4,88	5,21	5,37	5,47	5,17	4,95	5,05	5,26	5,20	6,60	5,32
Jawa Timur	6,68	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,57	5,46	5,50	5,52	5,92
Banten	6,08	7,03	6,83	6,67	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81	5,53	5,99

sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan table 1.2, selama periode 2010-2019 Nilai PDRB Provinsi di pulau jawa mengalami fluktuasi, Provinsi Jawa Barat lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur ,berdasarkan tabel diatas laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 5,74% tergolong lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta 6,16% dan Provinsi Banten 5,99%. Dilihat dari angka rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yang selisihnya tidak terlalu jauh dengan Provinsi lain di Pulau jawa. Dapat di indikasikan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber modal/investasi, sehingga dalam jangka panjang Provinsi Jawa Barat dapat memiliki potensi untuk bersaing dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Dari tabel diatas bias kita lihat pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi setiap tahunnya, pada tahun 2011 dan 2012 PDRB Provinsi Jawa Barat sebesar 6,50% naik 0,30% dari tahun

sebelumnya yaitu tahun 2010. Namun pada tahun 2014 PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu sebesar 1,24% yang semula sebesar 6,33% pada tahun 2014 turun menjadi 5,09% pada tahun 2014, hal ini terjadi karena seiring dengan menurunnya harga-harga ekspor komoditi utama, akibat melemahnya tuntutan dari Tiongkok dan pasar-pasar utama lainnya. Sedangkan ketidakpastian politik juga membuat investasi asing menahan diri karena banyak perusahaan yang ingin melihat hasil pemilihan presiden lalu.

Provinsi Jawa Barat Memiliki 27 kabupaten/kota yang berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, dengan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi yang menyumbangkan rata-rata pertumbuhan PDRB terbesar karena merupakan pusat perekonomian dan pusat pemerintahan daerah.



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, Badan Pusat Statistik (BPS).

**Gambar 1.1 Rata-rata Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi JawaBarat Tahun 2010-2019 (%)**

Gambar 1.1 menunjukkan kontribusi kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 10 tahun dimulai dari tahun 2010-2019, masing-masing daerah memiliki nilai PDRB yang bervariasi dikarenakan setiap daerah memiliki karakteristik dan perbedaan, Kota Bandung menjadi penyumbang

PDRB tertinggi sebesar 7,69% diikuti dengan kota Depok sebesar 6,69% dan Kota Bogor sebesar 6,13%, Lalu yang memiliki kontribusi terendah yaitu Kabupaten Indramayu sebesar 2,73%

Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memainkan peran yang penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan kemiskinan Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Penduduk yang berpendidikan tamatan SMA keatas (tamatan SMA dan Perguruan tinggi) diasumsikan mempunyai keterampilan dan pengetahuan tinggi, sehingga dapat menyerap teknologi modern dan meningkatkan kapasitas produksi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

**Gambar 1.2**

**5 Kabupaten/kota di Jawabarot yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah**

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa 5 Kabupaten/kota di Jawa Barat yang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi dan terendah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah pada 10 tahun terakhir, dilihat dari data di atas tahun yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2019 yaitu sebesar 8.37 tahun naik sebesar 0,22 tahun yang semula 8.15 tahun pada tahun 2018, lalu pada tahun 2017 tingkat rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,19 tahun yang semula 7,95 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,14 tahun pada tahun 2017. hal ini dapat terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat akan pendidikan sudah meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.3**  
**Lima Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang memiliki Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi dan Terendah Tahun 2015-2019 (Tahun)**

<b>Kab/Kota</b>	<b>Rata-rata Lama Sekolah</b>
Kota Cimahi	10.71
Kota Bekasi	10.66
Kota Depok	10.58
Cirebon	6.30
Indramayu	5.46

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di lima Kota/Kabupaten Jawa Barat yang memiliki nilai tertinggi dan terendah pada 10 tahun terakhir mengalami peningkatan yang fluktuasi dilihat dari tabel di atas kota/kabupaten yang menempati peringkat pertama dalam Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Cimahi dengan angka 10,71 tahun atau setara dengan kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), lalu di urutan ke dua ada Kota Bekasi dengan 10,66 tahun dan yang ketiga ada Kota Depok dengan

10,58 tahun. Sedangkan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terendah ke 2 ada Kabupaten Cirebon dengan angka 6,30 tahun , dan daerah terendah ditempati oleh Kabupaten Indramayu dengan angka 5,46 tahun atau setara dengan kelas 5 Sekolah Dasar (SD)

Disamping Pendidikan, salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi adalah Kesehatan . kesehatan juga turut mempengaruhi kualitas Sumber daya manusia di Jawa Barat. Tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Jika angka harapan hidup meningkat, berarti menandakan kesehatan semakin membaik, dan pertumbuhan ekonomi juga semakin bagus.

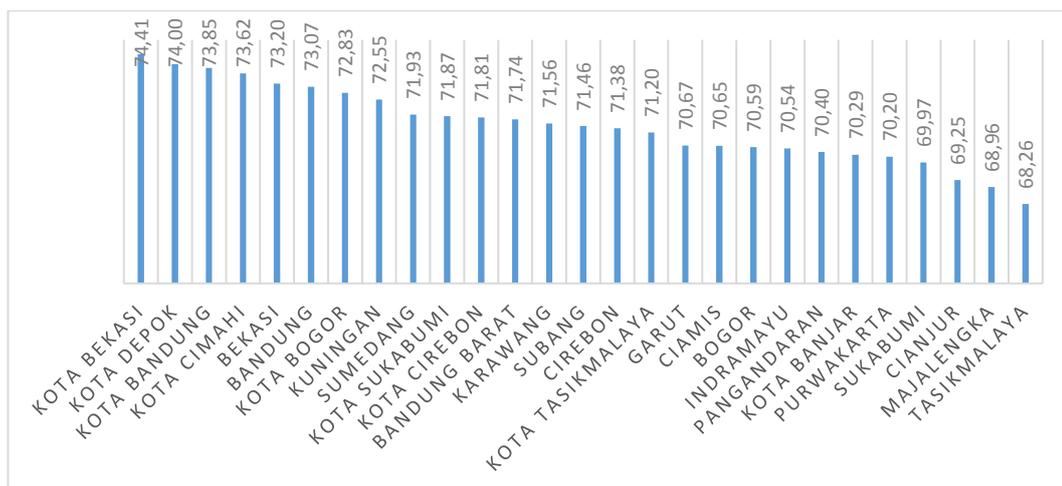
**Tabel 1.4**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2019 (tahun)**

<b>Tahun</b>	<b>Angka Harapan Hidup (AHH)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2010	71.29	-
2011	71.56	0.38
2012	71.82	0.36
2013	72.09	0.37
2014	72.23	0.19
2015	72.41	0.25
2016	72.44	0.04
2017	72.47	0.04
2018	72.66	0.26
2019	72.85	0.26

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.4 menjelaskan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2010-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun tidak terlalu signifikan, dilihat dari tabel di atas tahun 2015 mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 25% yang semula di angka 72,23 tahun di

tahun 2014 meningkat menjadi 72,41 tahun, lalu peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada tahun 2018 yang semula 72,47 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 72,66 tahun hal tersebut terjadi karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan yang secara tidak langsung membuat peningkatan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

**Gambar 1.3 Angka Harapan Hidup Kota/Kabupaten Jawa Barat Tahun 2010-2019 (tahun)**

Gambar 1.3 menjelaskan rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) Kota/Kabupaten selama 10 tahun mulai tahun 2010-2019, Kota Bekasi menempati peringkat tertinggi dengan angka 74,41 tahun, lalu di peringkat kedua ada Kota Depok dengan angka 74,00 tahun, Sedangkan peringkat terendah ada Kabupaten Tasikmalaya dengan angka 68,26 tahun, dapat dilihat semakin kecil angka harapan hidup maka tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan masih kurang atau rendah.

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Menurut Harrod-Domar, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi

yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro dan Smith, 2011). Sodik dan Nuryadin (2005) menyatakan bahwa investasi disepakati menjadi salah satu kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh.

Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi khususnya yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta ialah investor yang berasal dari luar negeri (PMA) maupun investor dari dalam negeri (PMDN). Sementara itu, investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik.

Kenaikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, tentunya tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Investasi atau penanaman modal oleh investor dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal oleh pihak asing (PMA) di Provinsi Jawa Barat, baik dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentase laju investasi yang terjadi ditunjukkan Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2017**

<b>Tahun</b>	<b>PMA (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>PMDN (Rp)</b>	<b>Pertumbuhan (%)</b>
2010	27.942.072.369.688		18.660.542.793.471	
2011	41.445.630.518.690	48.33	7.305.546.091.010	-60.85
2012	3.936.013.764.000	-90.50	16.023.986.763.557	119.34
2013	67.500.904.581.000	1615	26.018.005.186.520	62.37
2014	6.561.946.400.000	-90.28	37.907.601.197.533	45.70
2015	7.284.668.500.000	11.01	18.155.880.100.000	-52.10

2016	10.961.067.200.000	50.47	114.930.436.000.000	533.02
2017	153.491.035.000.000	1300	230.454.707.000.000	100.52

Sumber : Jawa Barat Dalam Angka 2010-2018, Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan Tabel 1.5 Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2017 berfluktuasi. Realisasi PMDN di Provinsi Jawa Barat meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp. 18,6 triliun menjadi Rp. 37,9 Triliun di tahun 2014, lalu pada tahun 2015 PMDN turun menjadi Rp. 18,1 triliun (-52,1%), lalu pada tahun 2016 PMDN meningkat sangat drastis yaitu sebesar Rp. 114,9 triliun naik 553,2%. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010-2017 juga berfluktuatif. Tahun 2011 PMA naik sebesar Rp. 41,4 triliun naik 48,3% dari semula hanya Rp. 27,9 triliun, dan kembali turun pada tahun 2012 menjadi Rp. 3,9 triliun (-90,5%). Berfluktuasinya realisasi PMA dan PMDN selama periode 2010-2017 ini disebabkan oleh investor yang belum sepenuhnya percaya untuk berinvestasi di Provinsi Jawa Barat karena kondisi perekonomian, sosial, politik, dan keamanan belum stabil.

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dan merangsang pertumbuhan ekonomi artinya semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik, dengan catatan mereka mempunyai daya beli, sehingga permintaan akan meningkat (Todaro, 1997:63). Namun apabila Pertumbuhan penduduk sangat pesat akan berakibat pada peningkatan jumlah kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja

merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk dalam usia kerja dalam kelompok yang sama.

**Tabel 1.6**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2010-2019 (%)**

Tahun	TPAK (%)	Pertumbuhan (%)	
2010	62,38	-	-
2011	62,27	-0,18	↓
2012	63,78	2,42	↑
2013	62,82	-1,51	↓
2014	62,77	-0,08	↓
2015	60,34	-3,87	↓
2016	62,72	3,94	↑
2017	63,34	0,99	↑
2018	62,92	-0,66	↓
2019	65,07	3,42	↑

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan ekonomi didalam perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun cenderung mengalami Fluktuasi. Berdasarkan tabel 1.6 tahun 2019 nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Barat berada pada peringkat tertinggi selama 10 tahun terakhir dengan nilai 65,07% mengalami kenaikan sebesar 3,43% dari tahun sebelumnya yaitu 2018 dengan nilai TPAK sebesar 62,92%. Lalu untuk nilai Tingkat Partisipasi Angkata Kerja (TPAK) terendah selama 10 tahun terakhir berada pada tahun 2015 dengan nilai 60,34% mengalami penurunan sebesar 3,87% dari tahun sebelumnya yaitu 2014 dengan nilai TPAK sebesar 62,77%

**Tabel 1.7**  
**Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota/Kabupaten Jawa Barat Tahun 2010-2019 (%)**

Kab/Kota	Rata Rata TPAK
Tasikmalaya	66,71
Ciamis	65,57
Majalengka	65,35
Kota Sukabumi	58,67
Pangandaran	30,34

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Tabel 1.7 menjelaskan bahwa rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota/Kabupaten Jawa Barat tahun 2010-2019 mengalami peningkatan yang fluktuasi dilihat dari tabel diatas kota/kabupaten yang menempati peringkat tertinggi /pertama yaitu kabupaten tasikmalaya dengan angka 66,71%, lalu diurutan kedua ada Kabupaten ciamis dengan nilai 65,57% dan di peringkat ketiga ada kabupaten majalengka dengan nilai 65,35%, sedangkan untuk peringkat terendah pada Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ditempati oleh Kabupaten Pangandaran dengan nilai 30,34% hal ini terjadi karena pada tahun 2012 Kabupaten pangandaran merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Ciamis, lalu untuk peringkat terendah kedua ditempati oleh kota Sukabumi dengan nilai rata-rata TPAK sebesar 58,67%.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari peranan kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, kesehatan , investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) di masing-masing daerah. Oleh sebab itu, penulis ingin melakukan

penelitian mengenai pengaruh pendidikan, kesehatan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan judul:

**“PENGARUH KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN, INVESTASI DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA-KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010-2019”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah untuk mengarahkan penelitian ini dari latar belakang yang telah diuraikan adalah :

1. Bagaimana perkembangan pendidikan, kesehatan, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) di kota/kabupaten provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan, Kesehatan, Investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan pendidikan, kesehatan, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) di kota/kabupaten provinsi Jawa Barat tahun 2010-2019.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, kesehatan, investasi dan tingkat partisipasi angkatan kerja (tpak) terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Jawa Barat tahun 2010-2019.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis/ Akademis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa sumber informasi khususnya pada kajian ilmu ekonomi dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya mengenai program-program pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi dinas pemerintahan yang terkait tentang analisis pengaruh pendidikan, kesehatan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kota/kabupaten Jawa Barat tahun 2010-2019.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana kontribusi investasi, tenaga kerja, dan tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pengetahuan untuk penelitian-penelitian di bidang kajian yang sama.
4. Untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai program-program pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia yang diberikan oleh pemerintah.